ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN ATAS PENDAPATAN DAN BEBAN PADA PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI (STUDI KASUS PADA PT MUSI JAYA BERSAMA TAHUN 2017-2018)

Skripsi oleh:

SEFTI WULANDARI

01031281520191

AKUNTANSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2019

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN ATAS PENDAPATAN DAN BEBAN PADA PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI (STUDI KASUS PADA PT MUSI JAYA BERSAMA TAHUN 2017-2018)

Disusun oleh :

Nama	: Sefti Wulandari
NIM	: 01031281520191
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi	: Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif

Tanggal Persetujuan **Dosen Pembimbing**

Ketua,

Tanggal : 23 Agustus 2019 **Hj. Rina Tjandrakirana DP, S.E, M.M., Ak, CA**
NIP. 19650311 199203 2 002

Anggota,

Tanggal : 23 Agustus 2019 **Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak**
NIP. 19650816 199512 1 001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN ATAS PENDAPATAN DAN BEBAN PADA PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI (STUDI KASUS PADA PT MUSI JAYA BERSAMA TAHUN 2017-2018)

Disusun oleh :

Nama	: Sefti Wulandari
NIM	: 01031281520191
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi	: Perpajakan

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 20 Desember 2019 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Inderalaya, 20 Desember 2019

Ketua,

Hj. Rina Tjandrakirana DP, S.E., M.M., Ak, CA
NIP. 19650311 199203 2 002

Anggota,

Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak
NIP. 19650816 199512 1 001

Anggota,

Meita Rahmawati, S.E., M.Acc., Ak, CA
NIP. 19860513 201504 2 002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 19730317 199703 1 002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengaruniakan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Analisis Perlakuan Akuntansi dan Perpajakan atas Pendapatan dan Beban pada Perusahaan Jasa Konstruksi (Studi Kasus pada PT Musi Jaya Bersama Tahun 2017-2018)". Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi, Program Strata Satu (S1), Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas tentang perlakuan akuntansi dan perpajakan atas pendapatan dan beban pada perusahaan jasa konstruksi, yaitu PT Musi Jaya Bersama untuk periode tahun 2017-2018.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan sebagai masukan bagi penulis untuk diperbaiki di masa mendatang. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi tambahan bagi yang membutuhkan.

Indralaya, 20 Desember 2019
Penulis

Sefti Wulandari
NIM. 01031281520191

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF ..... **ii**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iii**

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH ..... **iv**

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

UCAPAN TERIMA KASIH ..... **vii**

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK ..... **x**

ABSTRAK ..... **xi**

ABSTRACT ..... **xii**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..... **xiii**

DAFTAR ISI ..... **xv**

DAFTAR TABEL ..... **xviii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xix**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xx**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Perumusan Masalah 6

1.3. Tujuan Penelitian 7

1.4. Manfaat Penelitian 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **9**

2.1. Teori Entitas *(Entity Theory)* 9

2.2. Akuntansi 10

2.2.1. Definisi Akuntansi 10
2.2.2. Siklus Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 12
2.2.3. Asumsi Dasar dan Prinsip Akuntansi 13
2.2.4. Laporan Keuangan 14
2.3. Pajak 18
2.3.1. Pengertian Pajak 18
2.3.2. Fungsi Pajak 19
2.3.3. Pengertian dan Tugas Hukum Pajak 20
2.3.4. Kedudukan Hukum Pajak 20
2.3.5. Sistem Pemungutan Pajak 21
2.4. Akuntansi Pajak 22
2.4.1. Pengertian Akuntansi Pajak 22
2.4.2. Tujuan Akuntansi Pajak 22
2.4.3. Hubungan Akuntansi Pajak dengan Akuntansi Komersial 23
2.4.4. Laporan Keuangan Fiskal 24
2.5. Jasa Konstruksi 24
2.5.1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi 25
2.5.1.1. Pasal 10 27
2.5.1.2. Pasal 10A 30
2.5.1.3. Pasal 10B 31
2.5.2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 34 31
2.5.2.1. Pendapatan Kontrak 32
2.5.2.2. Biaya Kontrak 33
2.5.2.3. Pengakuan Pendapatan dan Beban Kontrak 34
2.5.3. Pajak untuk Penghasilan dari Jasa Konstruksi 36
2.5.3.1. PPh Pasal 23 36
2.5.3.2. PPh Pasal 4 Ayat (2) 38
2.6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan 40
2.7. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 52

2.8. Harga Jual 53
2.9. Penelitian Terdahulu.....56
2.10. Kerangka Pemikiran 58
BAB III METODE PENELITIAN 59
3.1. Ruang Lingkup Penelitian 59
3.2. Jenis dan Sumber Data 60
3.3. Metode Pengumpulan Data 60
3.4. Teknik Analisis Data 61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 62
4.1. Gambaran Umum Penelitian 62
4.2. Pengakuan Pendapatan dan Beban pada PT. Musi Jaya Bersama 63
4.2.1. Pengakuan Pendapatan.....63
4.2.2. Pengakuan Beban.....67
4.3. Perlakuan Akuntansi dan Perpajakan atas Nilai Kontrak 70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 73
5.1. Kesimpulan.....73
5.2. Saran 74
DAFTAR PUSTAKA.....75
LAMPIRAN 77

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu.....56
Tabel 4.1. Beban Pokok Usaha PT Musi Jaya Bersama 68
Tabel 4.2. Beban Usaha PT Musi Jaya Bersama 69

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran 58
Gambar 4.1. Pendapatan Usaha PT Musi Jaya Bersama 65
Gambar 4.2. Pajak Penghasilan Final PT Musi Jaya Bersama 67

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran I Laporan Laba Rugi PT Musi Jaya Bersama.....77
Lampiran II Catatan Atas Laporan Keuangan PT Musi Jaya Bersama 78

ABSTRAK

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN ATAS PENDAPATAN DAN BEBAN PADA PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI (STUDI KASUS PADA PT MUSI JAYA BERSAMA TAHUN 2017-2018)

Oleh :

Sefti Wulandari
Hj. Rina Tjandrakirana DP, S.E., M.M., Ak, CA
Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan akuntansi dan perpajakan atas pendapatan dan beban pada perusahaan jasa konstruksi. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah perusahaan jasa konstruksi, yaitu PT Musi Jaya Bersama untuk periode tahun 2017-2018. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT Musi Jaya Bersama mengakui pendapatan dan beban atas dasar akrual sesuai dengan PSAK No. 1. Pendapatan diakui sebesar nilai kontrak dan menggunakan metode persentase penyelesaian sesuai dengan PSAK No. 34. Beban diakui sesuai dengan Pasal 6 Ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008. Perhitungan PPh Final sesuai dengan PP No. 40 Tahun 2009, dan perbandingan harga jual menurut akuntansi perpajakan dan akuntansi keuangan yang sama, sehingga tidak perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal.

Kata kunci : ***Pendapatan, Beban, Harga Jual, Kontrak Konstruksi, PPh Final***

Ketua,	Anggota,
Hj.Rina Tjandrakirana DP, S.E., M.M., Ak, CA	Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak
NIP. 19650311 199203 2 002	NIP. 19650816 199512 1 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 19730317 199703 1 002

BAB I
PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mengandalkan pendapatan pada sektor pajak. Pajak ialah iuran rakyat untuk kas negara didasarkan undang-undang yang tidak mendapatkan imbalan langsung serta ditunjukkan dan dipergunakan membiayai rumah tangga negara (Mardiasmo, 2011). Bagi negara, pajak adalah sumber penerimaan negara yang paling besar, karena APBN sebagian besar dibiayai oleh pajak. Pajak merupakan suatu pilar utama dalam menopang jalannya pemerintahan dan pembangunan nasional.

Salah satu bidang yang sangat berperan dalam pembangunan nasional terutama dalam memberikan jasa pelayanan untuk membangun berbagai macam sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat adalah bidang usaha jasa konstruksi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi menimbang bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional.

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi menimbang bahwa jasa konstruksi adalah layanan jasa

konsultansi konstruksi dan/ atau pekerjaan konstruksi. Konsultansi konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Baik perencana konstruksi, pelaksana konstruksi maupun pengawas konstruksi dapat berbentuk orang perseorangan ataupun badan usaha, serta mempunyai sertifikasi dari ahli yang profesional di bidang masing-masing jenis usaha konstruksi tersebut.

Penghasilan atas bidang usaha jasa konstruksi ada yang dikenakan PPh Final dan PPh Non Final. Undang-Undang perpajakan yang mengatur tentang bidang usaha jasa konstruksi terdapat dalam dua pasal, yaitu PPh Pasal 23 (PPh Non Final) dan PPh Pasal 4 Ayat (2) (PPh Final). Selain itu, usaha jasa konstruksi juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.40 Tahun 2009 mengenai Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi.

Menurut Nainggolan dan Riza (2017) menyatakan bahwa perusahaan jasa konstruksi ini penting untuk menunjang keberhasilan program-program pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat yang berupa pembangunan fisik, seperti pembangunan perumahan, perkantoran, jalan, jembatan,

pabrik dan lain sebagainya. Perusahaan jasa konstruksi adalah pihak yang mengerjakan program-program pembangunan tersebut yang dilakukan melalui salah satu proses pengerjaan mulai dari perencanaan oleh biro teknik/ arsitektur, jasa perbaikan, dan konstruksi bangunan, serta kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan aktivitas jasa konstruksi.

Perusahaan jasa konstruksi biasanya mengerjakan pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan dalam waktu yang cukup lama yang dapat melampaui jangka waktu periode akuntansi yang normal. Sehingga menimbulkan masalah dalam pengakuan pendapatan yang diterima dan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, hal ini dapat mempengaruhi besarnya laba/ rugi perusahaan untuk suatu periode akuntansi (Nainggolan dan Reza, 2017). Oleh karena itu, perlu untuk mencermati penerapan akuntansi perpajakan dalam bidang usaha jasa konstruksi apakah sudah sesuai atau tidak. Aspek perpajakan untuk bidang usaha jasa konstruksi memiliki ciri khusus karena sifatnya berbeda dengan bidang usaha lainnya, dilihat dari siklus operasinya yang memiliki waktu lebih dari satu tahun, sehingga pendapatan dan bebannya pun dihitung secara khusus (Sarjono, 2017).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018) tujuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 34 menggambarkan tentang perlakuan akuntansi pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan kontrak konstruksi. Oleh karena sifat dari aktivitas yang dilakukan pada kontrak konstruksi, tanggal saat aktivitas kontrak mulai dilakukan dan tanggal saat aktivitas tersebut diselesaikan biasanya jatuh pada periode akuntansi yang berlainan. Persoalan utama dalam akuntansi

kontrak konstruksi adalah alokasi pendapatan kontrak dan biaya kontrak pada periode pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015) akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi keuangan yang menekankan pada penyusunan surat pemberitahuan pajak (SPT) dan pertimbangan konsekuensi perpajakan terhadap transaksi atau kegiatan perusahaan. Ketentuan perpajakan merupakan produk lembaga legislatif yang mengikat semua anggota masyarakat (termasuk profesi akuntan). Dengan demikian, apabila terjadi kekurangsesuaian antara ketentuan perpajakan dan praktek akuntansi atau standar akuntansi yang berlaku umum, maka Undang-Undang Perpajakan mempunyai prioritas untuk dipatuhi di atas praktek dan kelaziman akuntansi. Secara umum, akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, apabila terjadi perbedaan antara ketentuan akuntansi dengan ketentuan pajak, maka untuk keperluan perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak, Undang-Undang dan ketentuan perpajakan memiliki prioritas untuk dipatuhi.

Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian terhadap perusahaan jasa konstruksi di Palembang, yaitu PT Musi Jaya Bersama. PT Musi Jaya Bersama adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi yang setiap tahunnya perusahaan berkewajiban membayar pajak penghasilan atas badan usahanya kepada negara. Perusahaan menyusun laporan keuangannya telah menerapkan SAK ETAP untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada 1

Januari 2011. SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) dimaksudkan untuk digunakan oleh Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP), yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum *(general purpose financial statement)* bagi pengguna eksternal. Manajemen perusahaan berpendapat bahwa laporan keuangan tahun 2012 telah disajikan sesuai dengan SAK ETAP dan telah memenuhi semua persyaratannya. Hal ini dilakukan perusahaan untuk dapat memberikan informasi akuntansi yang sesuai dengan kepentingan pihak internal dan eksternal perusahaan.

Laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan (laporan komersial) belum dapat memenuhi kepentingan pihak-pihak tertentu terutama fiskus. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan waktu (perbedaan sementara) dan perbedaan tetap atas pengakuan pendapatan dan beban, sehinggga laba yang dilaporkan pada Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) (laba fiskal) berbeda jumlahnya dengan yang dilaporkan pada laporan keuangan (laba komersial). Menurut Iryani (2011) untuk menghitung pajak penghasilan badan yang terhutang, terlebih dahulu harus dilakukan koreksi fiskal atas laporan komersial tersebut, karena terdapat perbedaan konsep pengakuan penghasilan (pendapatan) dan biaya (beban) antara perpajakan dan akuntansi.

Adanya perbedaan konsep tersebut akan mempengaruhi tingkat laba pada perusahaan. Apabila sebagian pendapatan (penghasilan) dan beban (biaya) tidak diakui di dalam pajak, dimana secara tidak langsung pajak penghasilan perusahaan

yang dibayar akan semakin besar, sehingga laporan laba rugi harus dikoreksi atau direkonsiliasi agar sesuai dengan peraturan perpajakan.

Berdasarkan uraian di atas, perlakuan akuntansi dan perpajakan dalam mengakui pendapatan dan beban merupakan faktor penting yang mempengaruhi besarnya laba/ rugi perusahaan tersebut yang nantinya akan berpengaruh pada besar kecilnya penghasilan kena pajak di akhir periode, sehingga penulis mengambil judul dalam penelitian ini adalah **"Analisis Perlakuan Akuntansi dan Perpajakan atas Pendapatan dan Beban pada Perusahaan Jasa Konstruksi (Studi Kasus pada PT Musi Jaya Bersama Tahun 2017 - 2018)".**

1. 2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlakuan akuntansi dan perpajakan atas pendapatan dan beban pada PT. Musi Jaya Bersama. Pendapatan tersebut akan dilihat berdasarkan nilai kontrak atau sama dengan harga jual dan beban-beban akan disesuaikan dengan Pasal 6 Ayat 1 dan Pasal 9 Ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008 serta mengacu pada PSAK 34 tentang Kontrak Konstruksi dan bagaimana perbedaan antara prinsip akuntansi keuangan dan prinsip akuntansi perpajakan yang akan dijelaskan dalam perhitungan harga jual yang sesuai dengan nilai kontrak, perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Dasar Pengenaan Pajak, sehingga diakhir penelitian akan dapat diketahui apakah harus dilakukan rekonsiliasi fiskal atau tidak. Serta, perhitungan Pajak Penghasilan Final mengingat pajak atas penghasilan dari bidang usaha jasa konstruksi diatur dalam Peraturan

Pemerintah No. 40 Tahun 2009, sehingga pajak tersebut ada yang dikenakan PPh Final (PPh Pasal 4 Ayat 2) dan PPh non Final (PPh psal 23).

1. 3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlakuan akuntansi dan perpajakan atas pendapatan dan beban pada PT. Musi Jaya Bersama dan menganalisis perbedaan antara prinsip akuntansi keuangan dan prinsip akuntansi perpajakan yang akan dijelaskan dalam perhitungan harga jual yang sesuai dengan nilai kontrak, perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Dasar Pengenaan Pajak, sehingga diakhir penelitian akan dapat diketahui apakah harus dilakukan rekonsiliasi fiskal atau tidak. Serta, perhitungan Pajak Penghasilan Final mengingat pajak atas penghasilan dari bidang usaha jasa konstruksi diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2009, sehingga pajak tersebut ada yang dikenakan PPh Final (PPh Pasal 4 Ayat 2) dan PPh non Final (PPh Pasal 23).

1. 4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin dicapai penulis sehubungan dengan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pengembangan literatur akuntansi dan perpajakan serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi perusahaan untuk lebih memahami perlakuan akuntansi dan perpajakan atas pendapatan dan beban, sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang lebih baik dan benar menurut akuntansi dan menurut peraturan perpajakan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Anauskah, Daniela dan Nurlela Hafizah. 2018. *Penerapan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Final atas Jasa Konstruksi E-SPT Masa 2017*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol. 4 No. 1 p-ISSN:2243-3071 e-ISSN: 2503-0337.

Harahap, Sofyan Syafri. 2016. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu*. Cet. ke-29. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2018. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

Iryani, Lia Dahlia. 2011. *Perlakuan Akuntansi atas Pendapatan dan Pengaruhnya Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Studi Kasus pada PT. X*. Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi Fakultas Ekonomi (JIMAFE) Volume Semester 1 2011.

Lisandri. 2016. *Analisis Pengakuan Pendapatan dan Beban Kontrak pada Perusahaan Kontraktor PT Nouvalindo Banjarmasin*. Jurnal Spread Vol. 6 No. 2.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Martani, Dwi, Sylvia Veronica NPS, Ratna Wardhani, Aria Farahmita, dan Edward Tanujaya. 2014. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.

Nainggolan, Adolpino dan Riza Satria Nugraha. 2017. *Analisis Perlakuan Akuntansi Pendapatan dan Beban Jasa Konstruksi Dalam Rangka Perhitungan Laba Kotor PT. Djasa Uber Sakti*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Ekonomi Vol. 1 No. 2.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.

Priantara, Diaz. 2013. *Perpajakan Indonesia Edisi 2 Revisi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Rembet, Dhian N, David P. Saerang, dan Heince Wokas. 2016. *Analisis Penerapan Akuntansi Perpajakan atas Jasa Konstruksi pada PT Dua Mutiara Sejati*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol. 16 No. 04.

Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Republik Indonesia. 2017. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Sarjono, Bayu. 2017. *Analisis Aspek Perpajakan atas Usaha Jasa Konstruksi dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan*. Jurnal Bisnis Terapan Vol. 1 No. 2e-ISSN 2597-4157p-ISSN 2597-4157.